

Pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif dan eksklusif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia: analisis data Proksi

Selamet Rahmadi, Dwi Hastuti

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fak.Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

E-mail korespondensi: selametselamet023@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Gini Ratio, used as a proxy for exclusive and inclusive economic growth, on the Human Development Index (HDI), used as a proxy for the level of public welfare, across 34 provinces in Indonesia during the 2016–2024 period. The data were obtained from Statistics Indonesia and analyzed using simple panel data regression. Model selection was conducted using the Chow test and the Hausman test, both of which indicated that the Fixed Effects Model was the most appropriate estimation model. The results reveal that the Gini Ratio has a negative and statistically significant effect on HDI. This finding indicates that increasing income inequality tends to be associated with a decline in the quality of human development, whereas a more equitable income distribution may contribute to improved public welfare. The coefficient of determination of 85.11 percent indicates that most of the variation in HDI can be explained by the Gini Ratio within the research model. Therefore, provincial governments should strengthen policies aimed at promoting income equality, reducing poverty, and expanding equitable and sustainable access to education, healthcare, employment opportunities, and public services.

Keywords: *proxy variables, exclusive economic growth, gini ratio, human development index*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Rasio Gini sebagai proksi pertumbuhan ekonomi eksklusif dan inklusif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2016–2024. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan regresi sederhana data panel. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model estimasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung diikuti oleh penurunan kualitas pembangunan manusia, sedangkan distribusi pendapatan yang lebih merata berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai koefisien determinasi sebesar 85,11 persen menunjukkan bahwa variasi IPM sebagian besar dapat dijelaskan oleh Rasio Gini dalam model penelitian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan layanan publik secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: variabel proksi, pertumbuhan ekonomi inklusif, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan atau kekayaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

Menurut Sen dalam Subandi (2018), kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai, antara lain hidup sehat, memiliki pengetahuan, serta memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. UNDP (2020) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan konsep pembangunan manusia yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk mencapai potensi diri.

Pengukuran tingkat kesejahteraan di setiap negara dapat menggunakan indikator yang berbeda. Amerika Serikat menggunakan IPM dan PDB per kapita; Kanada menggunakan IPM dan Indeks Kesejahteraan Ekonomi (IEWB); sedangkan Australia menggunakan IPM dan indeks kesejahteraan masyarakat (GWI) (UNDP, 2020). Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta indikator sosial lainnya. Selain itu, Indonesia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan (BPS, 2020).

IPM digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (1) bersifat multidimensional karena mencakup tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak; (2) memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan indikator tunggal; (3) mengukur aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia; (4) menggunakan data yang tersedia secara luas sehingga memudahkan analisis dan perbandingan antarwilayah atau antarnegara; serta (5) memiliki metodologi yang konsisten sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih adil (BPS, 2020). Penggunaan IPM juga sejalan dengan teori investasi modal manusia yang dijelaskan oleh Sen, Ul Haq, dan UNDP dalam Sukarniati (2020), bahwa produktivitas dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia.

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, menimbulkan kerusakan lingkungan, dan memperburuk kualitas hidup apabila manfaatnya tidak terdistribusi secara merata (Stiglitz, 2012).

Dampak positif dan negatif tersebut mendorong banyak negara untuk tidak hanya mengutamakan peningkatan pendapatan, tetapi juga mengarahkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, perhatian pembangunan mulai bergeser dari pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksklusif menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif penting karena berpotensi mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sosial (Bank Dunia, 2020).

Dalam penelitian ini, karakter inklusif atau eksklusif dari pertumbuhan ekonomi diprosikan menggunakan Rasio Gini. Rasio Gini digunakan karena dapat

menggambarkan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan (Sen dalam Subandi, 2018). Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan selanjutnya dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Ravallion, 2013).

Hubungan antara Rasio Gini dan IPM dapat dijelaskan melalui distribusi pendapatan. Semakin rendah Rasio Gini, semakin merata distribusi pendapatan sehingga kondisi tersebut berpotensi mendukung peningkatan IPM. Sebaliknya, Rasio Gini yang tinggi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar dan dapat menghambat peningkatan IPM.

Provinsi-provinsi di Indonesia memperlihatkan variasi nilai Rasio Gini dan IPM selama periode 2016–2024. Rata-rata Rasio Gini Indonesia sebesar 0,385 dan termasuk kategori sedang, sedangkan rata-rata IPM sebesar 72,41 dan termasuk kategori tinggi. Variasi serupa juga terlihat pada tingkat provinsi. Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata Rasio Gini terendah, yaitu 0,259 atau termasuk kategori rendah, dengan rata-rata IPM sebesar 71,91 atau termasuk kategori tinggi. Sementara itu, DI Yogyakarta memiliki rata-rata Rasio Gini tertinggi di antara provinsi yang dianalisis, yaitu 0,436 atau termasuk kategori sedang, tetapi memiliki rata-rata IPM sebesar 80,04 atau termasuk kategori sangat tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, Rasio Gini yang rendah tidak selalu diikuti oleh IPM yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini menjadi dasar penelitian untuk mengukur besarnya pengaruh Rasio Gini sebagai proksi pertumbuhan ekonomi eksklusif dan inklusif terhadap IPM sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi-provinsi Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kesejahteraan masyarakat dan indeks pembangunan manusia

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara. Kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan atau kekayaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Sen dalam Subandi (2018) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan. UNDP (2020) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari konsep pembangunan manusia yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk mencapai potensi diri.

Berbagai faktor perlu diperhatikan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Stiglitz (2012) menguraikan beberapa aspek utama, yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta pemeliharaan keamanan dan stabilitas sosial. Sementara itu, BPS (2023) mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, indikator sosial lainnya, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat karena menggambarkan capaian pembangunan kualitas hidup manusia melalui dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (BPS, 2023; UNDP, 2020). Dalam skala 0–1, UNDP (2022) mengelompokkan IPM menjadi empat kategori, yaitu rendah ($IPM < 0,550$), sedang ($0,550 \leq IPM < 0,700$), tinggi ($0,700 \leq IPM < 0,800$), dan sangat tinggi ($IPM \geq 0,800$). Kategori tersebut ekuivalen dengan batas 55,00; 70,00;

dan 80,00 apabila IPM disajikan dalam skala 0–100.

Frisdiantara dan Mukhlis (2018) menguraikan teori kapabilitas (Sen), teori kesejahteraan sosial (Sen dan Dreze), teori pembangunan manusia (Ul Haq), dan teori pembangunan berkelanjutan (UNDP). Teori-teori tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hidup manusia melalui IPM.

Teori pertumbuhan ekonomi dan rasio gini

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan ketimpangan pendapatan dan kerusakan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya bertujuan meningkatkan pendapatan tanpa memperhatikan pemerataan dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi eksklusif. Dalam kondisi tersebut, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak memperoleh manfaat secara memadai. Hal ini dapat menyebabkan tingginya ketimpangan pendapatan, meningkatnya kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan kerja.

Dampak negatif pertumbuhan ekonomi eksklusif mendorong banyak negara atau daerah untuk mengarahkan tujuan pembangunan pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ini dipandang lebih mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Stiglitz, 2012).

Dalam penelitian ini, Rasio Gini digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan karakter eksklusif atau inklusif dari pertumbuhan ekonomi. Rasio Gini dipilih karena dapat menjelaskan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang terbentuk dalam proses pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan pengurangan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat (Stiglitz, 2012).

Selain Rasio Gini, ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan berbagai pendekatan, antara lain indeks Atkinson, indeks Theil, koefisien variasi, dan indeks Palma (Daryanto, 2018). Menurut Todaro dan Smith (2015), tingkat ketimpangan berdasarkan Rasio Gini dapat dikelompokkan menjadi rendah ($RG < 0,30$), sedang ($0,30 \leq RG < 0,50$), dan tinggi ($RG \geq 0,50$). Sementara itu, UNDP (2022) mengelompokkannya menjadi rendah ($RG < 0,40$), sedang ($0,40 \leq RG \leq 0,50$), dan tinggi ($RG > 0,50$).

Hubungan rasio gini dengan indeks pembangunan manusia

Pertumbuhan ekonomi, baik yang bersifat eksklusif maupun inklusif, pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hubungan empiris antara karakter pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh Rasio Gini dan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan oleh IPM dapat menunjukkan hasil yang berbeda. Hartati (2021), Hartono (2020), Setyowati (2022), Muhammad (2022), Smith (2020), dan Chen (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dan eksklusif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Sementara itu, penelitian Oktaviani (2020), Taylor (2022), Kim (2020), Fauzan (2022), Nurhaliza (2021), Rizky (2022), dan Fatimah (2021) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dan eksklusif tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM atau kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2016–2024. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya publikasi Statistik Indonesia dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Analisis dilakukan menggunakan regresi sederhana data panel yang menggabungkan data runtut waktu (time series) dan data lintas wilayah (cross section). Rasio Gini digunakan sebagai proksi pertumbuhan ekonomi eksklusif dan inklusif, sedangkan IPM digunakan sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat. Estimasi regresi data panel dilakukan menggunakan EViews melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t dan analisis koefisien determinasi (Widarjono, 2018). Persamaan model panel dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 RG_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

IPM_{it} = Indeks pembangunan manusia provinsi i pada tahun t

RG_{it} = Rasio gini provinsi i pada tahun t

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien regresi Rasio Gini

μ = efek khusus masing-masing provinsi

ε_{it} = komponen galat pada provinsi i dan tahun t

i = provinsi;

t = tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model terbaik

Regresi data panel digunakan untuk mengukur pengaruh Rasio Gini sebagai proksi pertumbuhan ekonomi eksklusif dan inklusif terhadap IPM sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi-provinsi Indonesia selama periode 2016–2024. Estimasi dilakukan menggunakan tiga pendekatan regresi data panel, kemudian dilanjutkan dengan pengujian untuk memilih model terbaik. Hasil pengujian pemilihan model disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	46.815398	(33,271)	0.0000
Cross-section Chi-square	582.079980	33	0.0000

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai statistik Cross-section Chi-square sebesar 582,079980 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, Fixed Effect Model lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect Model.

Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai Cross-section random Chi-square sebesar 24,050502 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, Fixed Effect Model lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect Model. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, model yang dipilih sebagai model estimasi terbaik adalah Fixed Effect Model.

Tabel 2. Hasil uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.050502	1	0.0000

Sumber: Data diolah, 2026

Estimasi persamaan regresi data panel

Model estimasi regresi data panel yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, persamaan estimasi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 98,18166 - 76,20456RG_{it} + \mu$$

Nilai konstanta dan koefisien regresi pada persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta sebesar 98,18166 menunjukkan nilai komponen intersep model ketika Rasio Gini bernilai nol, sebelum memperhitungkan efek tetap masing-masing provinsi.
2. Koefisien Rasio Gini sebesar -76,20456 menunjukkan bahwa peningkatan Rasio Gini sebesar 0,01 diperkirakan menurunkan IPM sebesar 0,76205 poin, dengan asumsi faktor lain dalam model tetap. Pengaruh tersebut signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0000.

Tabel 3. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98.18166	2.562845	38.30963	0.0000
Gini Ratio	-76.20456	7.343754	-10.37679	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.851052	Mean dependent var		71.60719
Adjusted R-squared	0.832365	S.D. dependent var		4.205805
S.E. of regression	1.721992	Akaike info criterion		4.032132
Sum squared resid	803.5841	Schwarz criterion		4.458032
Log likelihood	-581.9162	Hannan-Quinn criter.		4.202464
F-statistic	45.54215	Durbin-Watson stat		0.776858
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2026

Uji hipotesis dan koefisien determinasi (R^2)

Uji hipotesis bertujuan menilai signifikansi pengaruh variabel independen, yaitu Rasio Gini, terhadap variabel dependen, yaitu IPM. Pada model ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial Rasio Gini terhadap IPM (Gujarati dan Porter, 2012).

Hasil estimasi menunjukkan nilai probabilitas Rasio Gini sebesar 0,0000, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, Rasio Gini berpengaruh signifikan terhadap IPM di provinsi-provinsi yang dianalisis. Nilai koefisien determinasi (R -squared) sebesar 0,851052 menunjukkan bahwa 85,11% variasi IPM dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh Rasio Gini dan efek tetap masing-masing provinsi dalam model, sedangkan 14,89% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Rasio Gini, sebagai gambaran ketimpangan pendapatan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di provinsi-provinsi Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan berkaitan dengan penurunan kualitas pembangunan manusia. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Oktaviani (2020), Taylor (2022), Kim (2020), Fauzan (2022), Nurhaliza (2021), Rizky (2022), dan Fatimah (2021), yang menjelaskan bahwa peningkatan ketimpangan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Arah pengaruh negatif menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan berkaitan dengan peningkatan IPM. Menurut Irawan dan Suparmoko (2017), hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan kapabilitas Sen, teori pembangunan manusia Ul Haq, teori ketimpangan pendapatan Kuznets, teori pembangunan berkelanjutan Sachs, dan teori keadilan distributif Rawls. Dalam konteks hubungan negatif tersebut, distribusi pendapatan yang lebih merata dapat memperluas kemampuan dan kesempatan individu untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan provinsi yang diarahkan pada pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, perluasan mobilitas sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengurangan ketimpangan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan stabilitas sosial, perluasan akses teknologi, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Tabel 4. Koefisien korelasi rasio gini terhadap IPM

Provinsi	Koefisien Korelasi	Keterangan	Provinsi	Koefisien Korelasi	Keterangan
Aceh	-0.9496	Kuat sekali	NTB	-0.3256	Lemah
Sumatera Utara	-0.3112	Lemah	NTT	-0.9335	Kuat sekali
Sumatera Barat	-0.9454	Kuat sekali	Kalimantan Barat	-0.7539	Sangat kuat
Riau	-0.7401	Sangat kuat	Kalimantan Tengah	-0.8512	Sangat kuat
Jambi	-0.2636	Lemah	Kalimantan Selatan	-0.9371	Kuat sekali
Sumatera Selatan	-0.7554	Sangat kuat	Kalimantan Timur	-0.7017	Kuat
Bengkulu	-0.4417	Kuat	Kalimantan Utara	-0.9333	Kuat sekali
Lampung	-0.7849	Sangat kuat	Sulawesi Utara	-0.3944	Lemah
Bangka Belitung	-0.8725	Sangat kuat	Sulawesi Tengah	-0.6384	Kuat
Kepulauan Riau	-0.1436	Sangat lemah	Sulawesi Selatan	-0.7652	Sangat kuat
DKI Jakarta	0.8511	Sangat kuat	Sulawesi Tenggara	-0.7797	Sangat kuat
Jawa Barat	0.8641	Sangat kuat	Gorontalo	0.4356	Kuat
Jawa Tengah	0.5945	Kuat	Sulawesi Barat	-0.3022	Lemah
Jawa Timur	-0.4004	Lemah	Maluku	-0.8124	Sangat kuat
DI Yogyakarta	0.3675	Lemah	Maluku Utara	-0.4308	Kuat
Banten	-0.4313	Kuat	Papua Barat	-0.6588	Kuat
Bali	-0.8283	Sangat kuat	Papua	-0.9852	Kuat sekali

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil estimasi gabungan seluruh provinsi juga dibandingkan dengan koefisien korelasi antara Rasio Gini dan IPM pada masing-masing provinsi. Sujarweni (2019) mengelompokkan tingkat keeratan korelasi berdasarkan nilai absolut koefisien, yaitu 0,00–0,20 (sangat lemah), 0,21–0,40 (lemah), 0,41–0,70 (kuat), 0,71–0,90 (sangat kuat), 0,91–0,99 (kuat sekali), dan 1,00 (sempurna). Dari 34 provinsi, sebanyak 29 provinsi memiliki korelasi negatif dan 5 provinsi memiliki korelasi positif. Korelasi positif menunjukkan bahwa peningkatan Rasio Gini pada beberapa provinsi berlangsung

bersamaan dengan peningkatan IPM. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya faktor lain yang turut memengaruhi kedua variabel, seperti investasi serta perbedaan struktur ekonomi dan sosial antarprovinsi. Hasil korelasi disajikan pada Tabel 4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Gini sebagai proksi pertumbuhan ekonomi eksklusif dan inklusif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksi tingkat kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung diikuti oleh penurunan capaian pembangunan manusia pada provinsi-provinsi di Indonesia selama periode 2016–2024. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih merata berpotensi mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pengaruh tersebut terbukti signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen, sehingga Rasio Gini merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan perubahan IPM antardaerah di Indonesia.

Saran

Pemerintah provinsi di Indonesia perlu memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan manfaat pembangunan guna mengurangi dampak ketimpangan pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kebijakan tersebut dapat difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, perluasan akses terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang produktif, memperbaiki kualitas infrastruktur dan lingkungan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik. Pengalokasian anggaran juga perlu diprioritaskan pada sektor-sektor yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan perlu terus ditingkatkan agar program pembangunan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang rentan serta berpenghasilan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia*.
 Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat*.
 Bank Dunia. (2020). *Laporan pembangunan dunia: Pembangunan yang inklusif*.
 Chen, E. (2022). Exclusive economic growth and human well-being: A cross-country analysis. *World Development*, 154(2).
 Daryanto. (2018). *Model-model kuantitatif untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah: Konsep dan aplikasi*. IPB Press.
 Fatimah, S. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi eksklusif terhadap ketimpangan pendapatan dan IPM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(1).
 Fauzan, M. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap IPM di provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(1).
 Frisdiantara, C., & Mukhlis, I. (2018). *Ekonomi pembangunan: Sebuah kajian teoretis dan empiris*. Universitas Kanjuruhan Malang.
 Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi ke-5, Jilid 2). Salemba Empat.

- Hartati, Y. S. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1).
- Hartono, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi eksklusif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara-negara maju. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 13(1).
- Irawan, & Suparmoko, M. (2017). *Ekonomika pembangunan*. BPFE.
- Kim, R. (2020). The dark side of exclusive economic growth: Its impact on the Human Development Index (HDI). *Journal of Economic Inequality*, 18(1).
- Muhammad, A. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2).
- Nurhaliza, S. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap pembangunan manusia di negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 8(2).
- Oktaviani, R. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap pembangunan manusia (IPM): Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2).
- Ravallion, M. (2013). *The idea of anti-poverty policy* (NBER Working Paper No. 19259). National Bureau of Economic Research.
- Rizky, M. (2022). Dampak pertumbuhan ekonomi eksklusif terhadap pembangunan manusia di provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(2).
- Setyowati, R. (2022). Dampak pertumbuhan ekonomi eksklusif terhadap pembangunan manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 9(1).
- Smith, J. (2020). The impact of exclusive economic growth on the Human Development Index (HDI) in developed countries. *Journal of Economic Development*, 45(1).
- Stiglitz, J. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.
- Subandi. (2018). *Ekonomi pembangunan*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Statistik untuk bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sukarniati, L. (2020). *Ekonomi sumber daya manusia*. Gramedia.
- Taylor, D. (2022). Exclusive economic growth and human development: A comparative analysis. *Comparative Economic Studies*, 64(2).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human development index (HDI)*.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021–2022: Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world*.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.